

MENINGKATKAN TRANSMIGRASI SEBAGAI USAHA MEMBERANTAS ATAU MENGURANGI KEMISKINAN

Murwatie B. RAHARDJO

PENDAHULUAN

Transmigrasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk menanggulangi masalah penduduk di Indonesia. Selama Repelita III mendatang ini, direncanakan sebanyak 500.000 kepala keluarga transmigran dipindahkan ke luar Jawa. Jumlah ini berarti suatu program peningkatan transmigrasi sebesar lebih dari 6 kali hasil pelaksanaan transmigrasi selama Pelita I dan Pelita II.¹

Dalam tulisan ini akan dibahas perkembangan pelaksanaan transmigrasi selama Pelita I dan II serta artinya bagi usaha melenyapkan atau sekurang-kurangnya mengurangi kemiskinan di pulau Jawa. Pertambahan penduduk merupakan salah satu sebab kemiskinan di pulau Jawa. Pembahasan ini juga akan dikaitkan dengan pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu jalur pemerataan pembangunan.

Hasil pelaksanaan transmigrasi selama sepuluh tahun terakhir ini belum dapat mempengaruhi keseimbangan jumlah penduduk antara pulau-pulau maupun daerah-daerah di seluruh Indonesia. Peningkatan transmigrasi sebesar 500.000 jiwa tiap tahun diharapkan akan mengurangi kira-kira 0,5% pertambahan penduduk di pulau Jawa. Sedangkan usaha-usaha lain diluar

1 Selama Pelita I dan Pelita II sampai tahun ke empat telah ditransmigrasikan sejumlah 363.288 jiwa.

ANALISA

transmigrasi seperti Keluarga Berencana, industrialisasi, intensifikasi pertanian di pulau Jawa juga akan mempengaruhi penanggulangan beberapa masalah utama penduduk.

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI SELAMA PELITA I DAN II

Kebijaksanaan transmigrasi dalam pembangunan kiranya tepat dilihat sebagai masalah perpindahan penduduk dalam kerangka penyediaan dan penyerapan tenaga kerja, khususnya dari Jawa yang padat penduduknya ke luar Jawa yang langka penduduknya. Dengan demikian, transmigrasi ini akan mempunyai fungsi penting untuk memperlancar pembangunan daerah, meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesatuan dan ketahanan nasional.

Jumlah penduduk di pulau Jawa yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk di lain-lain pulau di luar Jawa merupakan alasan pokok transmigrasi. Karena pemusatan penduduk di Jawa, dengan tingkat hidup yang sebagian besar masih belum layak, diharapkan transmigrasi dapat meningkatkan kehidupan mereka. Sebab, tanpa usaha ini akan terjadi kecenderungan yang lebih besar bahwa petani miskin berurbanisasi dan umumnya mereka berakhir menjadi gelandangan. Dengan demikian dapat kita bayangkan bagaimana keadaannya di waktu yang mendatang apabila pertambahan penduduk sebesar 2,3% tiap tahun itu tidak diimbangi dengan pertambahan bahan makanan atau pertambahan penyediaan lapangan kerja. Untuk pulau Jawa yang mempunyai rapat penduduk 604 jiwa/km² pada tahun 1975¹ dan perkiraan pertambahan penduduk sebesar 2,1% tiap tahun, transmigrasi diharapkan dapat mengambil peranan penting.

Selama Pelita I, tahun 1969/1970 — 1974/1975, penduduk Jawa menurut perkiraan meningkat dari 73.575.000 jiwa menjadi 81.801.000 jiwa, atau meningkat dengan sebesar 8.226.000 jiwa². Tabel 1 menunjukkan jumlah transmigran selama Pelita I sebesar 210.573 jiwa, dan selama Pelita II sejumlah 179.897 jiwa. Semen-

1 Biro Pusat Statistik, *Buku Saku Statistik Indonesia 1977*, hal. 4 dan 27

2 Biro Pusat Statistik, *Statistical Year Book 1976*, hal. 102 dan 103

taranya itu penduduk pulau Jawa sudah bertambah lagi sebesar 7.102.000 jiwa. Jadi kalau dilihat angka-angkanya, jumlah transmigran sebanyak 390.470 jiwa belum mempunyai arti apa-apa dibandingkan dengan pertambahan penduduk sebesar 15.328.000 jiwa dalam waktu 9 tahun. Tetapi secara keseluruhan program transmigrasi yang dituangkan dalam Repelita I dan II telah dinyatakan cukup berhasil karena 94,3% dari jumlah penduduk yang direncanakan dipindahkan ke luar Jawa telah terlaksana.¹

Tabel 1

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI MENURUT PROPINSI ASAL SELAMA PELITA I (1969 — 1974) DAN PELITA II (1974 — 1978)

Propinsi asal	Pelita I		Pelita II		Jumlah penduduk menurut sensus 71		Kepadatan penduduk
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	
1. D.K.I. Jakarta	2.185	1,04	10.333	5,74	4.576.009	3,8	7.944
2. Jawa Barat	26.932	12,79	20.314	11,29	21.632.684	18,1	440
3. Jawa Tengah	62.977	29,90	73.326	40,76	21.877.081	18,4	634
4. D.I. Yogyakarta	26.936	12,79	13.487	7,50	2.489.998	2,1	793
5. Jawa Timur	62.988	29,91	49.690	27,62	25.526.714	21,4	539
6. N.T.B.	1.451	0,69	5.822	3,24	2.202.333	1,9	101
7. Bali	26.996	12,82	6.925	3,85	2.120.338	1,8	377
8. Trans. lokal	108	0,05					
Jumlah	210.573	100,00	179.897	100,00	80.425.157	67,5	

Sumber : Lihat Tabel 1 dan 2 dalam lampiran

Wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai daerah pengirim atau daerah asal adalah :

- a) daerah-daerah miskin, tandus dan kering, misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- b) daerah-daerah subur yang sangat padat penduduknya, seperti daerah-daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, D.K.I. Jakarta, Bali, Lombok;

1 Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden R.I., tanggal 15 Agustus 1974, hal. 660, dan 16 Agustus 1978, hal. 671

ANALISA

- c) daerah-daerah bencana alam, seperti daerah-daerah di sekitar gunung berapi yang masih aktif yang membahayakan penduduk di sekitarnya, juga daerah-daerah yang sering terkena banjir, seperti D.K.I. Jakarta;
- d) daerah-daerah yang terkena proyek pembangunan seperti daerah yang sekarang ini menjadi daerah proyek pembangunan waduk serba guna di Wonogiri, Jawa Tengah.

Selama Pelita I dan Pelita II, Jawa Tengah merupakan daerah pengirim terbesar (62.977 jiwa pada Pelita I dan 73.326 jiwa pada masa Pelita II). Kemudian menyusul Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, D.K.I. Jakarta dan Lombok. Diantara transmigran tersebut terdapat sejumlah 77.112 jiwa (17.185 kepala keluarga) sebagai transmigrasi spontan¹. Para transmigran ini pindah ke daerah-daerah proyek transmigrasi atas biaya sendiri. Diantara transmigran spontan ini sejumlah 6.000 k.k. (26.305 jiwa) mendapat dorongan dengan adanya program "Transmigrasi Spontan Bantuan Presiden" sebelum akhir tahun anggaran 1973 — 1974. Ada juga transmigran yang dibantu oleh Yayasan Makarti Mukti Tama. Yayasan ini bertujuan sosial dalam merangsang daya tarik transmigrasi di antara petani yang tidak mampu dan yang cukup inisiatif untuk meningkatkan hidupnya.²

Dalam pelaksanaan transmigrasi umum untuk setiap kepala keluarga dibuka 3 ha tanah, sebesar 2 ha untuk setiap keluarga, dimana 0,25 ha dimaksudkan untuk tanah pekarangan dan 1,75 ha dimaksudkan untuk tanah persawahan/ladang, dan sisanya untuk umum dan jalur hijau atau untuk pengembangan prasarana desa. Selain itu setiap kepala keluarga transmigran mendapat bantuan-bantuan lain seperti :

- a) sarana produksi pertanian berupa bibit padi, bibit tanaman pekarangan, pestisida termasuk racun tikus dan racun babi, pupuk;
- b) paket jaminan hidup pada bulan-bulan pertama, selama 12 bulan bagi transmigran yang ditempatkan di daerah

1 Biro Pusat Statistik, *Statistical Year Book 1977*

2 Hardjono J.N., *Transmigration In Indonesia*, (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1977) hal. 33 — 34

- pemukiman tanah kering, dan selama 18 bulan bagi yang ditempatkan di daerah pemukiman pasang surut, setiap bulan memperoleh bantuan berupa beras, ikan asin, minyak goreng, gula pasir, minyak tanah, garam dan sabun cuci;
- c) Selain itu juga sarana-sarana lain berupa rumah, pelayanan pendidikan bagi anak-anak transmigran, pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.

Bantuan ini diberikan selama para transmigran belum dapat berdiri sendiri, yaitu tahun-tahun pertama sebelum tanah garapan mereka dapat menghasilkan. Ketentuan-ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Transmigrasi No. 3 Tahun 1972.

PENGARUH TRANSMIGRASI TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA

Program transmigrasi yang dikaitkan dengan pembangunan nasional tidak lepas dari situasi penduduk pulau Jawa. Keadaan penduduk Jawa yang bekerja di bidang pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan pada tahun 1977 meliputi 56,7% dari seluruh penduduk Jawa.¹

Pelaksanaan transmigrasi selama Pelita I dan II menunjukkan bahwa transmigrasi untuk masa-masa mendatang dapat dipakai sebagai usaha yang sangat menentukan bagi pembangunan. Hal ini disebabkan karena dengan menyebarnya penduduk Jawa ke pulau-pulau lain di luar Jawa, selain mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, juga merupakan usaha penyediaan tenaga kerja bagi pembangunan di luar Jawa. Pemandahan penduduk miskin tanpa penyediaan lapangan kerja akan menggagalkan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan pertanian di luar Jawa secara nasional merupakan usaha penting untuk memenuhi kebutuhan pangan

1 Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Triwulan IV 1977*, Jakarta, Maret 1978

ANALISA

seluruh penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Tetapi usaha ini perlu dikaitkan dengan pelaksanaan transmigrasi yang pada hakekatnya diwujudkan dalam penyediaan tenaga kerja di daerah-daerah yang langka penduduknya. Kondisi di luar Jawa memungkinkan pembangunan pertanian mempunyai masa depan yang cerah.¹ Daerah-daerah seperti Sumatera, terutama Sumatera Utara, dan Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, dapat ditanam padi sepanjang tahun dengan cara penanaman padi yang bergilir dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor : (a) perbedaan musim hujan dengan kemarau di daerah-daerah tersebut tidak terasa, bahkan hujan sepanjang tahun; (b) variasi temperatur di dataran rendah dengan daerah pegunungan yang berbeda-beda; (c) di luar Jawa masih banyak juga terdapat gunung-gunung berapi yang masih aktif yang abunya menyuburkan tanah-tanah, yang baik untuk pertanian. Keadaan tersebut memungkinkan perluasan di bidang pertanian, seperti tanaman-tanaman karet, kopi, lada dan tembakau yang memerlukan daerah yang luas, selain untuk tanaman padi. Dari sudut mendapatkan daerah yang luas bagi pertanian tanaman-tanaman tersebut memang sudah perlu diadakan pembukaan tanah.

Dalam Repelita III, perluasan areal persawahan mendapat perhatian yang besar, baik areal lahan kering, lahan basah, pasang surut maupun lebak. Keadaan fisik lingkungan daerah utama di luar Jawa, meliputi keadaan topografi tanah dan sumber air, dijadikan pedoman guna menentukan lokasi areal pertanian yang sesuai. Hal ini diperlukan untuk menentukan budidaya pertanian serta pola tanam yang cocok di berbagai lahan.

Hal-hal semacam itulah yang dilaksanakan bersama-sama dengan adanya program transmigrasi, dimana tenaga kerja yang mengerjakan tanah-tanah pertanian yang baru tersebut adalah para transmigran. Dalam tahun-tahun mendatang akan dibuka seluas 39.000 ha setahun areal persawahan baru.² Disamping itu

1 Mubyarto, Dr., *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1973), hal. 10

2 *Sinar Harapan*, 1 Februari 1979

perlu diusahakan secara bertahap untuk mengubah sumber air menjadi daerah pengairan. Untuk itu juga akan diadakan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 530.000 ha. Juga akan dibangun jaringan irigasi baru seluas 700.000 ha dan pen-cetakan sawah baru seluas lebih dari 350.000 ha. Disamping itu akan dibuka irigasi pasang surut seluas 400.000 ha dan reklamasi rawa seluas 135.000 ha. Untuk menjamin penyaluran air ke daerah-daerah persawahan, maka akan direhabilitasi jaringan tertier yang mencukupi areal sekitar 600.000 ha.

Perluasan pembangunan di bidang pertanian merupakan sasaran pokok kebijaksanaan transmigrasi. Menurut sensus pertanian 1973, jumlah petani di Jawa meliputi 12,6 juta rumah tangga. Dari jumlah ini 9,0 juta rumah tangga merupakan keluarga petani miskin, yaitu 5,2 juta rumah tangga petani yang mempunyai tanah kurang dari 0,5 ha, dan 3,8 juta rumah tangga petani yang tidak mempunyai tanah.¹ Petani-petani kecil semacam inilah yang diberikan prioritas untuk dipindahkan ke luar Jawa. Dengan mentransmigrasikan golongan petani ini di daerah baru diharapkan penghidupan mereka meningkat. Di daerah transmigrasi mereka disediakan tanah pertanian, perumahan dan jaminan-jaminan selama tahun-tahun pertama sebelum mereka dapat menghasilkan. Dasar pemikiran yang dianut adalah bahwa seseorang yang telah memutuskan untuk menjadi transmigran telah memutuskan untuk tidak mau hidup miskin lagi. Bagaimanapun, di daerah transmigrasi ia akan memiliki faktor produksi utama, yaitu tanah, yang di daerah asalnya tidak dipunyainya. Dengan demikian mereka dapat mengusahakan atau mengolah tanahnya dan menghasilkan. Dari hasil pertaniannya itu mereka dapat menghidupi sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah hasil pertanian yang dicapai di daerah transmigrasi pada umumnya selama Pelita I:²

-
- 1 Sajogyo, "Golongan Miskin dan Pembangunan Desa", *Prisma* 3, Maret 1977
 - 2 Departemen Penerangan R.I., *Nota Keuangan, Rencana Anggaran Penerimaan/Belanja Negara 1973/1974*

ANALISA

- padi sawah : rata-rata 1,6 ton gabah per hektar (setahun 2 kali panen);
- padi gogo : rata-rata 0,9 ton gabah per hektar;
- jagung : rata-rata 1,5 ton pipilan per hektar;
- kacang-kacangan : rata-rata 1,2 ton wose per hektar.

Pada masa Pelita II tingkat produksi di daerah proyek transmigrasi meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2

TINGKAT PRODUKSI BEBERAPA KOMODITI HASIL PERTANIAN 1973/1974 — 1977/1978

Macam komoditi	1973/'74	1974/'75	1975/'76	1976/'77	1977/'78
1. Padi (ton/ha)					
a. non pasang surut	0,96	1,15	1,50	1,95	2,88
b. pasang surut	1,10	1,30	1,80	1,92	2,0
2. Palawija (ton/ha)					
a. singkong	4,50	5,50	7,00	7,30	13,62
3. Tanaman keras (batang/ha)	10,00	20,00	25,00	38,00	38,00

Sumber: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden R.I.*, tanggal 16 Agustus 1978 hal. 674

Selain hasil pertanian di daerah transmigrasi peternakan juga dikembangkan seperti terlihat di bawah ini :

Tabel 3

PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DAERAH TRANSMIGRASI TIAP 100 KK 1973/1974 — 1977/1978

Macam komoditi	1973/'74	1974/'75	1975/'76	1976/'77	1977/'78
1. Ternak besar (sapi dan kerbau) (ekor)	1	8	12	17	18
2. Ternak Unggas (ayam dan itik) (ekor)	315	368	482	498	240

Sumber: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden R.I.*, tanggal 16 Agustus 1978, hal. 674

Keadaan ini menunjukkan pelaksanaan transmigrasi secara ekonomis dapat meningkatkan taraf hidup para transmigran. Sudah barang tentu suatu usaha pasti di sana sini mengalami kegagalan-kegagalan. Seperti halnya proyek transmigrasi Rasau Jaya Kalimantan Barat, di mana pertanian kurang berhasil karena kurang cermatnya pemilihan lahan yang memenuhi syarat untuk tanah pertanian. Di daerah transmigrasi Rasau Jaya tanahnya merupakan tanah gambut yang merupakan rawa-rawa. Tetapi setelah diadakan penyelidikan, masalah ini dapat diatasi dengan cara memberikan penerangan dan bimbingan tentang cara memproses tanah tersebut menjadi tanah yang memenuhi syarat baik bagi pertanian. Di proyek transmigrasi Ongka Malino Sulawesi Selatan, 20% transmigran asal D.K.I. Jakarta tidak tahan menghadapi medan keadaan pemukiman mereka yang baru, sehingga mereka memutuskan untuk lari meninggalkan wilayah proyek.

Walaupun hasil pelaksanaan transmigrasi ditinjau secara kuantitatif dan secara nasional belum berarti, tetapi pemindahan itu sendiri telah dapat dirasakan langsung oleh pribadi para transmigran dan keluarganya. Melalui program transmigrasi seperti yang digariskan saat ini, petani dari Jawa yang tidak bertanah akan memperoleh faktor produksi yang terpenting baginya, yaitu tanah. Kesempatan ini tidak mungkin diperolehnya dengan cara lain. Dengan demikian jelas bahwa transmigrasi tidak hanya bertujuan mengurangi tekanan penduduk dan ketimpangan pembagian penduduk, tetapi sekaligus memberikan jalan kepada para petani miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya.

TRANSMIGRASI DAN PEMERATAAN PENDAPATAN

Pada akhirnya, pemerintah harus mengambil keputusan untuk membantu rakyat yang miskin ini. Pada masa pembangunan sekarang ini peranan pemerintah dalam pelaksanaan transmigrasi lebih menonjol lagi, dan dalam Repelita III target program transmigrasi ditingkatkan kira-kira 6 (enam) kali. Target ini akan meliputi 500.000 kepala keluarga atau sekitar 2.500.000 jiwa.

Masalahnya sekarang adalah apakah untuk mencapai target ini telah disiapkan atau disusun dasar kebijaksanaan yang mantap bagi pelaksanaan transmigrasi untuk lima tahun mendatang ini. Target tersebut memang belum merupakan jumlah yang menentukan bagi penambahan penduduk di pulau Jawa sebesar 2,1% tiap tahun ini. Namun jumlah ini amat besar dibandingkan dengan pelaksanaan transmigrasi di waktu yang lalu. Salah satu implikasi pelaksanaan ini menyangkut segi pembiayaan yang amat besar, di mana 50% target Repelita III ini didukung oleh APBN, dengan 45% dari pembiayaan tersebut diharapkan berasal dari dana pinjaman luar negeri. Untuk keperluan ini Bank Dunia telah menyetujui pemberian bantuan sebesar 1 milyar dollar A.S. Sedangkan sisanya, yaitu 50% lagi, diharapkan datang dari pihak swasta yang ingin ikut menyelesaikan program transmigrasi.¹

Dengan demikian realisasi target tersebut sangat tergantung kepada dana yang dapat disediakan atau dikumpulkan. Pembiayaan Repelita III untuk program transmigrasi dan program pembinaan daerah transmigrasi untuk tahun pertama adalah sebesar 146.199,4 juta rupiah. Sedangkan perkembangan pembiayaan program transmigrasi selama Pelita I dan II dapat dilihat pada Tabel 4. Transmigrasi spontan (transmigrasi swakarsa) ikut pula menentukan berhasil tidaknya program ini.

Dari uraian serta data-data yang dikemukakan di atas dapat diharapkan pengaruh yang semakin besar dari kegiatan transmigrasi terhadap usaha mengurangi kemiskinan di Jawa. Besar kecilnya pengaruh itu jelas sekali tergantung kepada laju kegiatan transmigrasi itu sendiri. Hal ini amat ditentukan oleh rangkaian atau keterpaduan yang erat dari aparat-aparat yang menunjang seluruh kegiatan transmigrasi, baik yang ada di daerah asal maupun di daerah penerima.

Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa penyelenggaraan transmigrasi bagi pulau Jawa tanpa disertai usaha-usaha lain akan mengurangi arti program transmigrasi

1 Lihat *Kompas*, tanggal 21 Desember 1978 dan 25 April 1979

Tabel 4

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DAN BIAYANYA SELAMA PELITA I
(1969/'70 — 1973/'74) DAN PELITA II (1974/'75 — 1978/'79)

Jumlah transmigran dan biaya	PELITA I						PELITA II					
	1969/'70	1970/'71	1971/'72	1972/'73	1973/'74	jumlah	1974/'75	1975/'76	1976/'77	1977/'78	1978/'79	jumlah
Jumlah transmigran K.K.	3.933	4.438	4.171	11.314	22.412	46.268	11.100	8.100	13.751	8.637	—	41.588
J i w a	17.846	20.005	18.924	51.927	101.871	210.573	45.732	34.985	62.653	36.527	—	179.897
Biaya transmigrasi ^{a)} (ribu rp.)	850.000	1.038.869	1.362.258	2.305.802	3.658.875	9.215.804	6.700.032	14.463.495	27.253.917	59.733.471	—	108.150.915
Biaya transmigrasi per keluarga ^{b)} (ribu rp.)	216,12	234,08	326,60	203,80	163,25	199,18	603,60	1.785,6	1.981,9	6.915,9	—	2.601,0
Biaya transmigrasi per jiwa ^{b)} (ribu rp.)	47,63	51,93	71,98	44,40	35,92	43,76	146,50	413,4	435,0	1.635,3	—	601,2

a) Berdasarkan Anggaran Pembangunan Dit. Jen. Transmigrasi

b) Dihitung berdasarkan biaya transmigrasi dibagi dengan jumlah keluarga transmigran dan banyaknya transmigran (jiwa) dalam tahun yang bersangkutan

(Sumber: Lihat Tabel III — VI dalam Lampiran).

secara demografis. Usaha-usaha itu ialah pelaksanaan Keluarga Berencana di segenap lapisan penduduk terutama di Jawa dan Bali. Usaha industrialisasi, selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang telah ada di sektor non pertanian, juga perlu ditegaskan fungsinya dalam penyerapan tenaga kerja yang menganggur di Jawa. Usaha lain, khususnya menyangkut pertanian di Jawa adalah program intensifikasi.

Program transmigrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dengan cara memberikan kesempatan kerja di daerah-daerah proyek pembangunan di luar Jawa. Jadi program transmigrasi merupakan salah satu jembatan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Data-data mengenai pengaruh transmigrasi terhadap kehidupan penduduk lama di daerah penerima belum ada. Tetapi perlu dipikirkan peluang apa yang serupa dan terbuka bagi golongan petani lama, yang masih bercorak tradisional. Corak usaha tani menetap dengan areal tanah antara 2 — 5 ha yang dirancang untuk transmigran umumnya kurang menarik bagi petani penduduk lama yang umumnya masih menjalankan usaha tani dengan pola "ladang berpindah-pindah" atau ada kalanya dengan pola sawah yang berpindah-pindah.¹ Ditinjau dari segi ini, perlu juga disusun rencana yang matang untuk menghindari ketegangan antara penduduk lama dengan para transmigran.

Dengan disediakannya tanah untuk pertanian serta fasilitas-fasilitas lain bagi transmigran maka transmigran akan mulai berproduksi. Dengan demikian penghasilan akan meningkat sehingga menambah daya beli mereka.

1 Sajogyo, *Transmigrasi : Jalur Pemerataan Pembangunan*, kertas karya pada Simposium Yayasan SPP Nasional, di Jakarta, 5 Desember 1978

LAMPIRAN

Tabel I

KEADAAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DIPERINCI MENURUT PROPINSI PENEMPATAN SELAMA
PELITA I 1969 — 1974

Propinsi asal Propinsi penempatan	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I. Yogyakarta	Jawa Timur	N.T.B.	B a l i	Jumlah (Jiwa)
1. D.I. Aceh	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Sumatera Utara	—	—	507	387	—	—	—	894
3. Sumatera Barat	—	—	1.285	826	—	—	—	2.111
4. R i a u	—	1.222	748	423	—	—	—	2.393
5. J a m b i	—	2.857	4.087	1.876	2.559	—	—	11.379
6. Sumatera Selatan	884	5.579	12.583	6.454	11.391	—	1.219	38.110
7. Bengkulu	152	1.588	3.319	1.496	1.348	—	—	7.903
8. Lampung	—	5.723	21.305	10.272	17.922	—	497	55.719
SUMATERA	1.036 *	16.969	43.834	21.734	32.220	—	1.716	118.509
9. Kalimantan Barat	—	1.096	1.409	292	1.624	—	—	4.421
10. Kalimantan Tengah	—	571	1.494	735	1.703	—	1.306	5.809
11. Kalimantan Selatan	—	1.222	2.162	238	5.937	—	454	10.013
12. Kalimantan Timur	271	887	4.347	827	5.723	—	—	12.065
KALIMANTAN	271	3.776	9.412	2.092	15.657	—	1.760	32.308
13. Sulawesi Utara	251	475	1.266	—	1.504	—	2.410	5.906
14. Sulawesi Tengah	273	345	2.398	350	4.510	—	10.408	18.392
15. Sulawesi Selatan	354	1.041	4.109	2.507	5.827	755	6.181	20.774
16. Sulawesi Tenggara	—	4.326	463	—	2.451	696	4.521	12.457
SULAWESI	878	6.187	8.236	2.857	14.292	1.451	23.520	57.529*
17. M a l u k u	—	—	1.001	253	479	—	—	1.733
18. Irian Jaya	—	—	494	—	—	—	—	494
TOTAL	2.185	26.932	62.977	26.936	62.988	1.451	26.996	210.573

* Termasuk 108 jiwa dari Sulawesi Tengah (Transmigrasi Lokal)

Sumber : B.P.S., Peta Pembangunan Sosial Desa 1930 — 1978

Tabel II

KEADAAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DIPERINCI MENURUT PROPINSI ASAL DAN PROPINSI PENEMPATAN SELAMA PELITA II 1974—1978

Propinsi asal Propinsi penempatan	D.K.I. Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I. Yogyakarta	Jawa Timur	N.T.B.	B A L I	Jumlah (Jiwa)
1. D.I. Aceh	—	—	2.199	190	1.103	—	—	3.492
2. Sumatera Utara	252	—	948	680	—	—	—	1.880
3. Sumatera Barat	406	—	14.886	932	252	—	—	16.476
4. R i a u	—	—	410	—	423	—	—	833
5. J a m b i	—	3.920	23.720	2.383	1.969	—	—	31.992
6. Sumatera Selatan	—	3.555	9.621	2.187	10.638	—	—	26.001
7. Bengkulu	584	2.364	2.394	1.191	2.139	—	—	8.672
8. Lampung	—	2.439	3.490	1.886	5.089	—	—	12.904
SUMATERA	1.242	12.278	57.668	9.449	21.613	—	—	102.250
9. Kalimantan Barat	638	894	2.509	345	883	—	—	5.269
10. Kalimantan Tengah	—	—	—	—	2.666	—	438	3.104
11. Kalimantan Selatan	—	873	5.115	1.792	5.632	—	429	13.841
12. Kalimantan Timur	813	1.344	453	394	7.672	—	—	10.676
KALIMANTAN	1.451	3.111	8.077	2.531	16.853	—	867	32.890
13. Sulawesi Utara	247	440	607	—	2.496	—	229	4.019
14. Sulawesi Tengah	665	1.601	4.440	356	5.450	2.694	2.788	17.994
15. Sulawesi Selatan	1.081	747	1.093	199	1.673	2.781	2.577	10.151
16. Sulawesi Tenggara	5.399	2.137	962	952	1.180	—	464	11.094
SULAWESI	7.392	4.925	7.102	1.507	10.799	5.475	6.058	43.258
17. M a l u k u	248	—	—	—	—	347	—	595
18. Irian Jaya	—	—	479	—	425	—	—	904
TOTAL	10.333	20.314	73.326	13.487	49.690	5.822	6.925	179.897

Sumber : Direktorat Jenderal Transmigrasi dimuat dalam Biro Pusat Statistik, *Peta Pembangunan Sosial Desa, 1930 — 1978*

Tabel III

**KEADAAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DIPERINCI MENURUT PROPINSI PENEMPATAN SELAMA
 PELITA I 1969 — 1974**

Propinsi penempatan	K. K.					Jumlah	J I W A					Jumlah
	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74		1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	
1. D. I. Aceh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Sumatera Utara	—	—	—	—	200	200	—	—	—	—	894	894
3. Sumatera Barat	—	—	—	—	450	450	—	—	—	—	2.111	2.111
4. R i a u	200	—	150	—	150	500	867	—	—	—	737	2.393
5. J a m b i	362	288	400	700	700	2.450	1.733	1.366	1.882	3.131	3.267	11.379
6. Sumatera Selatan	931	1.023	800	3.150	2.700	8.604	3.819	4.226	3.433	14.459	12.173	38.110
7. Bengkulu	—	100	—	800	1.050	1.950	—	469	—	3.730	3.704	7.903
8. Lampung	1.000	517	650	2.350	7.639	12.156	4.691	2.289	2.952	10.461	35.326	55.719
SUMATERA	2.493	1.928	2.000	7.000	9.989	23.410	11.110	8.350	9.056	31.781	58.212	118.509
9. Kalimantan Barat	102	200	150	300	200	952	517	939	693	1.267	1.005	4.421
10. Kalimantan Teng.	98	105	300	600	150	1.253	490	496	1.364	2.708	751	5.809
11. Kalimantan Selatan	140	150	100	300	1.150	1.840	631	719	1.877	1.448	5.338	10.013
12. Kalimantan Timur	200	400	175	400	1.500	2.675	961	1.806	814	1.804	6.680	12.065
KALIMANTAN	540	855	725	1.600	1.900	5.620	2.599	3.960	4.748	7.227	13.774	32.308
13. Sulawesi Utara	—	60	—	100	1.149	1.309	—	286	—	552	5.068	5.906
14. Sulawesi Tengah	150	779	809	1.014	1.626	4.378	740	3.764	2.343	4.566	6.979*	18.392*
15. Sulawesi Selatan	750	541	200	800	2.177	4.468	3.397	2.388	853	3.953	10.183	20.774
16. Sulawesi Tenggara	—	225	437	600	1.371	2.633	—	1.004	1.924	2.875	6.654	12.457
SULAWESI	900	1.605	1.446	2.514	4.323	10.788	4.137	7.442	5.120	11.946	28.884	57.529
17. M a l u k u	—	50	—	100	200	350	—	253	—	479	1.001	1.733
18. Irian Jaya	—	—	—	100	—	100	—	—	—	494	—	494
TOTAL	3.933	4.438	4.171	11.314	22.412	46.268	17.846	20.005	18.924	51.927	101.871	210.573*

Sumber: Direktorat Tengah. Transmigrasi dimuat dalam Biro Pusat Statistik, *Peta Pembangunan Sosial Desa, 1930 — 1978*

* Termasuk Transmigrasi Lokal

Tabel IV

KEADAAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DIPERINCI MENURUT PROPINSI PENEMPATAN SELAMA PELITA II 1974 — 1978

Propinsi penempatan	K.K.				Jumlah	J I W A				Jumlah
	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78		1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	
1. D.I. Aceh	—	300	500	—	800	—	1.417	2.075	—	3.492
2. Sumatera Utara	500	—	—	—	500	1.880	—	—	—	1.880
3. Sumatera Barat	500	—	2.250	1.200	3.950	1.739	—	9.990	4.747	16.476
4. Riau	200	—	—	—	200	833	—	—	—	833
5. Jambi	1.150	1.000	3.000	1.699	6.849	4.994	4.325	14.850	7.823	31.992
6. Sumatera Selatan	3.000	1.000	651	1.000	5.651	13.898	4.556	3.023	4.524	26.001
7. Bengkulu	600	500	500	250	1.850	2.608	2.455	2.515	1.094	8.672
8. Lampung	1.000	1.000	500	400	2.900	4.666	4.427	2.272	1.539	12.904
SUMATERA	6.950	3.800	7.401	4.549	22.700	30.618	17.180	34.725	19.727	102.250
9. Kalimantan Barat	300	500	300	194	1.294	1.271	2.016	1.162	820	5.269
10. Kalimantan Tengah	200	—	500	—	700	865	—	2.239	—	3.104
11. Kalimantan Selatan	300	1.000	1.000	997	3.297	1.280	4.346	4.230	3.985	13.841
12. Kalimantan Timur	500	—	500	1.400	2.400	2.086	—	2.238	6.352	10.676
KALIMANTAN	1.300	1.500	2.300	2.591	7.691	5.502	6.362	9.869	11.157	32.890
13. Sulawesi Utara	500	—	550	—	1.050	1.523	—	2.496	—	4.019
14. Sulawesi Tengah	800	1.000	1.490	1.297	4.587	2.117	4.556	6.631	4.690	17.994
15. Sulawesi Selatan	1.100	—	1.000	200	2.300	4.370	—	4.828	953	10.151
16. Sulawesi Tenggara	250	1.700	900	—	2.850	1.007	6.408	3.679	—	11.094
SULAWESI	2.650	2.700	3.940	1.497	10.787	9.017	10.964	17.634	5.643	43.258
17. Maluku	200	—	—	—	200	595	—	—	—	595
18. Irian Jaya	—	100	110	—	210	—	479	425	—	904
TOTAL	11.100	8.100	13.751	8.637	41.588	45.732	34.985	62.653	36.527	179.897

Sumber : Direktorat Jenderal Transmigrasi dimuat dalam Biro Pusat Statistik, *Peta Pembangunan Sosial Desa, 1930 — 1978*

Tabel V

ANGGARAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI DALAM PELITA I

NO.	BIDANG	TAHUN — ANGGARAN					JUMLAH
		1969/1970	1970/1971	1971/1972	1972/1973	1973/1974	
1.	Bidang Ekonomi	797.340.000	959.869.000	1.262.836.000	2.213.399.000	3.537.785.000	8.771.229.000
2.	Bidang Umum	50.000.000	34.000.000	57.257.000	61.403.000	68.250.000	270.910.000
3.	Bidang Sosial	2.660.000	45.000.000	42.165.000	31.000.000	52.840.000	173.665.000
JUMLAH :		850.000.000	1.038.869.000	1.362.258.000	2.305.802.000	3.658.875.000	9.215.804.000

Sumber : Dit. Jen. Transmigrasi

Tabel VI

ANGGARAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI DALAM PELITA II

NO.	PROGRAM	TAHUN — ANGGARAN				Jumlah
		1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	
1.	Program Transmigrasi	6.098.064.800	9.929.685.000	19.372.994.000	29.890.033.000	81.942.694.800
2.	Program Pembinaan Desa Transmigrasi	332.180.000	2.430.000.000	5.036.448.000	26.786.128.000	48.744.756.000
3.	Pendidikan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.995.000	595.583.000	518.792.000	800.000.000	2.575.260.000
4.	Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintahan	25.000.000	44.800.000	50.000.000	45.360.000	211.940.000
5.	Penelitian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	139.920.000	1.125.377.000	1.878.521.000	1.581.950.000	6.470.117.000
6.	Peningkatan Prasarana Fisik.	89.873.000	337.000.000	415.162.000	630.000.000	1.974.150.000
JUMLAH :		6.700.032.800	14.463.495.000	27.253.917.000	59.733.471.000	141.918.917.000

Sumber : Dit. Jen. Transmigrasi